

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S.R. 2018. Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai (Non Cash) dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Skripsi. STIE Widya Wiwaha.
- Ditjen Bina Keuangan.2017. Implementasi Transaksi Non Tunai.keuda.kemendagri.go.id
- Mardiasmo.2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- Pelealu, Angelina, Grace B. Nangoi, dan Natalia Y.T. Gerungai. 2018. Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Belitung. *Going Concern*, 13(4), 220-229
- Peraturan Bupati Jepara No. 3 Tahun 2019. Mekanisme pembayaran atas beban APBD
- Peraturan Bupati Jepara No. 43 Tahun 2017. Sistem pembayaran non tunai dalam APBD
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 11 Tahun 2013. Perubahan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011. Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sarwono, Jonathan.2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah.2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : CV Alfabeta
- Septiani, Selly dan Endah Kusumastuti. 2009. Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Irons*, 11(3), 1171-1181.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Bandung. CV. Alfabeta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ. Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ. Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota

Utari, Nikesari Puji dan Roy Valiant Salomo. 2016. Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta